**GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Surat Kabar** | **:** | **Jurnal Nasional** | **Tgl/Bln/Thn** | **:** | **10 November 2007** |
| **Subyek** | **:** | **Perubahan Iklim** | **Hari** | **:** | **Sabtu** |
| | | | **Halaman** | **:** | **10** |


# Pemanasan Global dan Manajemen Sampah

**Retno Kustiati**

Isu pemanasan global kini tengah menjadi perbincangan di mana-mana. Terlebih-lebih, menjelang diadakannya *Conference of Parties* (COP) ke-13, *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada 4-13 Desember nanti di Bali. Pada intinya, semua pihak diminta untuk membantu menghambat laju risiko ancaman pemanasan global.

Secara garis besar, makna pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim, seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sementara, di belahan bumi lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan akibat kenaikan suhu.

Untuk menghambat kondisi itu, diperlukan upaya dan tindakan nyata. Salah satunya dengan mengurangi pelepasan gas rumah kaca melalui pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang baik. Seperti diketahui, TPA baik dengan sistem *sanitary landfill* maupun *open dumping* akan mengeluarkan gas karbondioksida (CO2) dan metana (CH4) -tergolong dalam gas rumah kaca-sebagai hasil proses dekomposisi sampah secara anaerobik.

Dalam proses itu, prosentase gas metana mencapai 60 persen dan karbondioksida 40 persen. Potensi pemanasan global oleh CH4 adalah 21 kali lebih besar dibandingkan gas CO2. Bahkan, di daerah tropis, produksi biogas lebih cepat dari pada di daerah nontropis.

Gas dengan kandungan metana yang tinggi berpotensi meledak sehingga perlu dikendalikan. Bila tidak dikontrol atau tidak dipergunakan maka gas itu akan lepas ke udara dan mencemari lingkungan. Bayangkan bila ini terjadi pada produksi sampah perkotaan di Indonesia yang hampir mencapai 10 juta ton per tahun. Namun, dengan kondisi tersebut kita seharusnya tertantang untuk mengubah sampah menjadi energi. Penangkapan atau ekstraksi gas di TPA menjadi sangat penting tidak saja bagi perlindungan dari pencemaran udara dan kesehatan, tetapi juga untuk perlindungan keamanan. Sebab, pada konsentrasi 5-15 persen di udara, gas metana dapat menyebabkan kebakaran di TPA.

**Kredit Karbon**

Menyikapi permasalahan sampah perkotaan yang kompleks, ada baiknya kita menoleh pada pengelolaan gas di TPA melalui proyek *Clean Development Mechanism* (CDM). Proyek ini dapat menjadi peluang untuk memperoleh kredit karbon. Seperti diketahui, Protokol Kyoto mewajibkan

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

negara maju (Annex I) agar pada periode komitmen I (2008-2012) menurunkan emisi gas rumah kaca rata-rata sebesar 5,2 persen dari total emisi dunia tahun 1990. Hal ini dimungkinkan melalui perdagangan karbon yang diatur dalam CDM.Negara berkembang dapat menjual kredit penurunan emisi kepada negara maju yang berkewajiban menurunkan emisi. Skema ini juga berupaya mendorong negara berkembang mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Dana yang disiapkan negara-negara maju untuk membeli kredit karbon hingga kini mencapai 2 miliar dolar AS.

Inilah peluang bagi kita untuk menuai devisa dari kredit karbon. Indonesia memiliki potensi karbon yang dapat diperdagangkan sebesar 2 persen atau setara dengan 125 juta ton CO2. Jika harga *Certified Emission Reductions* (CER) -bentuk pengurangan emisi gas rumah kaca dari proyek CDM yang disertifikasi-di pasar internasional sebesar 6 dolar AS per ton CO2, maka nilai ekonomi yang akan diperoleh sekitar 750 juta dolar AS dari transaksi penjualan CER untuk periode komitmen I.

*Revenue* tersebut pada gilirannya dapat dipergunakan untuk meningkatkan kondisi TPA. Ia menjadi insentif tersendiri atau menambah kontribusi pembiayaan dalam pengelolaan sampah.

Sayang, negara kita masih terbilang lambat memanfaatkan peluang devisa tersebut. Berdasarkan data medio tahun lalu, baru enam proyek yang tengah dievaluasi Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (KN-MPB).

Bandingkan dengan India, misalnya, yang telah meloloskan 107 proyek CDM pada saat itu. Kegiatan-kegiatan tersebut diperkirakan menghasilkan pemasukan sebesar 2,6 miliar dolar AS bagi negara berpenduduk satu milar orang itu. Negara lain yang tampak agresif mengejar pemasukan dari CDM adalah Brazil, Chili, dan China. Mungkin kelambanan di negara kita karena KN-MPB baru berdiri pada awal 2006. Kini, kesadaran akan hal tersebut mulai terlihat dengan adanya proyek percontohan berbasis CDM di beberapa kabupaten.

Namun dari semua pembahasan tadi, perlu diingat bahwa pengelolaan sampah sebenarnya bertujuan untuk menangani permasalahan akibat timbunan sampah kota. Keuntungan dari proyek CDM hanyalah merupakan insentif bagi pelayanan dan pengelolaan kota, bukan merupakan tujuan utama. Tapi kalau bisa mendapatkan kedua hal positif itu secara bersamaan, mengapa tidak?

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP